

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada BAB IV tesis ini, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan kebijakan untuk mencapai Target 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya dijalankan secara optimal, walaupun dari aspek jumlah NPWP yang telah diterbitkan telah mencapai 10 juta, namun ternyata tidak mencapai sasaran yang diharapkan, misalnya NPWP diterbitkan kepada wajib pajak yang sama (*double*), pembantu rumah tangga, tukang ojek, bahkan kepada orang yang ternyata sudah meninggal, sehingga sasaran yang dicapai dalam program ekstensifikasi tersebut belum sepenuhnya tercapai sehingga tujuan akhirnya pun yaitu untuk meningkatkan penerimaan Negara belum dapat tercapai.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan 10 juta Nomor Pokok Wajib Pajak adalah komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut sudah berjalan dengan baik, kecuali faktor komunikasi, khususnya aspek sosialisasi yang dianggap kurang maksimal dilakukan sehingga sampai saat ini belum bisa merubah paradigma masyarakat tentang pajak. Di program sosialisasi inilah sangat dituntut peran DJP untuk bisa merubah pandangan masyarakat tentang perpajakan dan diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat akan pentingnya pajak.
3. Masyarakat masih enggan mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak dan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) karena belum adanya pembedaan, baik kemudahan atau pun fasilitas lainnya yang dapat

'menggugah' masyarakat agar mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

## B. Saran

1. Perlunya sosialisasi secara berkelanjutan baik bagi masyarakat yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar untuk menambah pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang perpajakan. Disamping hal tersebut perlu juga dilakukan sosialisasi secara masal kepada pembayar pajak untuk memperlihatkan lebih jelasnya penggunaan uang pajak yang dibayar masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa 'dirugikan' atas pungutan pajak tersebut.
2. Perlu disusun suatu sistem informasi tentang data base wajib pajak, sehingga tercipta suatu sistem kebersinambungan atas data-data yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak dan melakukan penyesuaian data secara berkala dalam jangka waktu tertentu sehingga dapat menjamin keakuratan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal pajak.
3. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah seharusnya memberikan *privilege* khusus bagi Wajib Pajak yang terdaftar. Salah satu yang dapat diberikan kepada wajib pajak yang mendaftarkan diri adalah dengan memperlakukan pembedaan tarif pajak antara kelompok masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan kelompok masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)